

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Dengan keterbatasan kapasitas keuangan daerah dan karakteristik alokasi belanja daerah, tidak semua penyelenggaraan urusan dapat diprioritaskan karena tujuan serta sasaran prioritas pembangunan daerah dalam suatu periode belum tentu terkait dengan seluruh urusan pemerintahan. Namun demikian, tidak berarti bahwa urusan dimaksud tidak diselenggarakan Pemerintah Daerah. Secara operasional, urusan-urusan tersebut tetap harus dilaksanakan untuk menjaga kinerja yang telah dicapai di masa-masa lalu atau memenuhi standar layanan bagi masyarakat. Analisis permasalahan pembangunan diseluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dimaksudkan guna menjamin diperolehnya identifikasi permasalahan penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan, diluar permasalahan program pembangunan daerah.

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu pilar dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat dengan sendirinya akan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat yang pada akhirnya

akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2014 PDRB per kapita Kabupaten Purbalingga sebesar Rp. 15,95 juta, masih jauh lebih rendah dibanding PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar Rp. 27,61 juta, dan PDB per kapita Nasional sebesar Rp. 41, 81 juta.

Dalam struktur PDRB Kabupaten Purbalingga, Sektor Pertanian masih memberi kontribusi terbesar yaitu sebesar 30,00 persen disusul Sektor Industri Pengolahan (23,50 persen), serta Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (14,21 persen). Meskipun angka PDRB per kapita relatif kecil tetapi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga dari tahun ke tahun cukup baik yaitu rata-rata 5,7 persen per tahun dalam lima tahun terakhir. Dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan Sektor Pertanian cenderung mengalami penurunan (lebih rendah dibanding pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan dan Jasa). Di sisi lain sektor sekunder dan tersier terus bertumbuh dengan lebih cepat seiring dengan perkembangan teknologi dan permintaan produk-produk manufaktur dan jasa.

Meskipun pertumbuhan ekonomi perlu untuk terus lebih didorong, tetapi apabila tidak diiringi dengan peningkatan pemerataan pendapatan maka tidak banyak memberi pengaruh terhadap peningkatan daya beli masyarakat. Oleh karena itu dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan per kapita masyarakat maka kebijakan yang perlu diambil adalah pengembangan serta peningkatan produktivitas dan daya saing sektor-sektor ekonomi rakyat seperti pertanian dalam arti luas, perdagangan, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), industri kecil dan industri rumah tangga, pariwisata serta koperasi. Dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan mengendalikan pencemaran lingkungan hidup, pengembangan investasi harus diarahkan pada pengembangan industri padat karya dan ramah lingkungan.

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembangunan bidang ekonomi, secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4). Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak (affirmative policy) terhadap Koperasi dan UMKM, telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat.

Oleh karena itu selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan ekonomi hari ini dan ke depan adalah kemandirian ekonomi nasional dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia (pro poor), selain itu potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional (pro growth). Keberadaan Koperasi dan UMKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (pro job) serta pro-environment.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Melihat visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga ***“Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya saing Menuju Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia”*** diturunkan misi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realita kebhinekaan.
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak.
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia utamanya melalui peningkatan drajad pendidikan dan kesehatan masyarakat.
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan jasa, peristiwa, industri kreatif, dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta di dukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi social dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana prasarana wilayah yang memadai.
7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dari beberapa misi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga tersebut yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Purbalingga adalah misi ke 5 yaitu ***Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan jasa, peristiwa, industri kreatif, dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta di dukung dengan penciptaan***

iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra K/L

Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, bahwa Kementerian Koperasi dan UKM adalah menangani Urusan Pemerintahan Dalam Rangka Penajaman, Koordinasi, dan Sinkronisasi Program Pemerintah Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan visi, yaitu : ***“Menjadi Kementerian yang Kredibel Guna Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang Tangguh dan Mandiri sebagai Soko Guru Perekonomian Nasional”***. Untuk mencapai visi di atas berikut dijabarkan ke dalam misi Kementerian Koperasi dan UKM RI, yaitu :

1. Mengimplementasikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik);
2. Menumbuhkan dan rnengembangkan kewirausahaan Koperasi dan UMKM;
3. Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM;
4. Mengembangkan pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM;
5. Meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi dan kesadaran berkoperasi.

Sedangkan tujuan Kementerian Koperasi dan UKM RI adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian Nasional, melalui :

- a. Meningkatkan jumlah Koperasi yang sehat, kuat dan dipercaya.
 - b. Meningkatkan peran dan kontribusi Koperasi dan UMKM dalam perekonomian Nasional.
2. Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, melalui:
 - a. Mengembangkan kebijakan dan program-program pemberdayaan Koperasi dan UMKM berdasarkan hasil kajian.
 - b. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan keterampilan SDM Koperasi dan UMKM.
3. Peningkatan Daya Saing Produk Koperasi dan UKM melalui meningkatkan kemampuan Koperasi dan UKM dalam mengembangkan produk-produk kreatif, inovatif, berkualitas dan berdaya saing.
4. Peningkatan Pemasaran Produk Koperasi dan UKM melalui meningkatkan kelembagaan dan jaringan pemasaran serta pangsa pasar produk Koperasi dan UKM.
5. Meningkatkan Akses Pembiayaan dan Penjaminan Koperasi dan UMKM melalui penyediaan skema dan memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan Koperasi dan UMKM.
6. Pengembangan Wirausaha Koperasi dan UMKM baru melalui :
 - a. Menumbuhkan wirausaha baru yang inovatif.
 - b. Meningkatkan kesadaran berwirausaha sebagai budaya dan mengembangkan kewirausahaan dikalangan masyarakat.
7. Perbaikan Iklim Usaha yang lebih berpihak kepada Koperasi dan UMKM melalui :
 - a. Meningkatkan kualitas layanan publik yang transparan, akuntabel dan kredibel.

- b. Menyediakan peraturan perundang-undangan yang lebih berpihak pada Koperasi dan UKM.

Dari tujuan tersebut, maka disusun sasaran strategis Kementerian Koperasi dan UKM RI sebagai berikut :

- a. Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian Nasional dengan :
 - a. Meningkatkan Koperasi berkualitas (10%) dan tumbuhnya (5%) jumlah Koperasi aktif secara Nasional.
 - b. Meningkatnya jumlah Koperasi aktif (55%) yang melaksanakan RAT.
 - c. Meningkatnya produktifitas UMKM (5%) per tahun.
 - d. Meningkatnya sumbangan UMKM dalam pembentukan PDB (6%) pertahun.
 - e. Meningkatnya rata-rata jumlah penyerapan tenaga kerja Koperasi dan UMKM sebesar (5%) per tahun.
 - f. Meningkatnya rata-rata nilai investasi Koperasi dan UMKM sebesar 10% per tahun.
 - g. Meningkatnya nilai ekspor produk UMKM (15%) per tahun.
- 2. Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dengan:
 - a. Meningkatnya jumlah SDM Koperasi dan UMKM yang mengikuti Diklat.
 - b. Terselenggaranya diklat kewirausahaan bagi para sarjana calon wirausaha.
 - c. Meningkatnya jumlah tempat praktek keterampilan usaha pada lembaga pendidikan pedesaan.
 - d. Tumbuh dan berkembangnya Lembaga diklat bagi Koperasi dan UMKM.
 - e. Tersedianya model-model praktek terbaik (best practices) internasional bagi pemberdayaan Koperasi.
 - f. Berkembangnya Koperasi dan UMKM dalam penerapan Informasi Teknologi dan teknologi tepat guna.

- g. Pengembangan kemitraan Koperasi dan UMKM dengan pelaku usaha melalui Meningkatnya jumlah dan kualitas kemitraan usah.
3. Daya Saing Produk Koperasi dan UMKM dengan :
 - a. Meningkatnya penggunaan produk Koperasi dan UMKM dalam negeri.
 - b. Menjaga 65% pangsa pasar Koperasi dan UMKM di bidang bisnis retail.
 - c. Meningkatnya ekspor non migas UMKM sehingga pangsa terhadap ekspor non migas nasional minimal sebesar 20% pertahun.
 4. Peningkatan pemasaran produk Koperasi dan UMKM dengan :
 - a. Tumbuh dan berkembangnya trading house di seluruh Provinsi.
 - b. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana produksi dan pemasaran.
 - c. Meningkatnya promosi produk Koperasi dan UMKM.
 - d. Meningkatnya jumlah dan kualitas warung retail modern milik Koperasi dan UMKM.
 - e. Memperkuat pemasaran produk Koperasi dan UMKM di sentra-sentra termasuk daerah tertinggal, terisolir dan perbatasan.
 - f. Mewujudkan Smesco UKM menjadi Icon Industri Kreatif dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM Nasional.
 5. Penyediaan akses pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM dengan :
 - a. Tersedianya SKIM pembiayaan yang mudah, terjangkau dan cepat, dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM.
 - b. Meningkatnya jumlah dan kualitas KSP/USP dan Lembaga pembiayaan lainnya.

- c. Meningkatnya penyelenggaraan, pengembangan dan pengawasan KSP/USP.
 - d. Memperkuat permodalan bagi produk Koperasi dan UMKM di sentra- sentra termasuk daerah tertinggal, terisolir dan perbatasan. sentra termasuk daerah tertinggal, terisolir dan perbatasan.
6. Perbaiki iklim usaha yang lebih berpihak pada Koperasi dan UMKM dengan:
- a. Terselenggaranya penataan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan bertanggung jawab.
 - b. Tersedia dan terlaksananya peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berpihak pada pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
 - c. Terciptanya keselarasan program dan kegiatan dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM melalui koordinasi lintas sektoral di tingkat pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota.
 - d. Tersedianya kajian dasar, kebijakan dan terapan yang prospektif dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
7. Pengembangan wirausaha Koperasi dan UKM baru dengan :
- a. Terciptanya 5.000 wirausaha baru dan kalangan sarjana.
 - b. Tersedianya modul-modul untuk meningkatkan kesadaran berwira-usaha.

3.3.2 Telaahan Renstra OPD Provinsi

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Tengah 2013 – 2018, ditetapkan visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah “MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI- Mboten Korupsi Mboten Ngapusi “ Dari Visi Jawa Tengah tersebut, dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Tri Sakti Bung Karno, berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi dan berkepribadian di Bidang Kebudayaan.
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa tengah yang bersih,jujur transparan “Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”
4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan.
5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
7. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan .

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka Dinas koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah mendukung pencapaian target pembangunan dari misi ke-2 Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan Dan Pengangguran.

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

Tabel
Deskripsi Kajian Indikasi Program RPJMD Kabupaten Purbalingga 2016- 2021 Terhadap Muatan KLHS

No	Nama Program	Muatan KLHS					
		Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Perkiraan Mengenai Dampak dan Resiko Lingkungan	Kinerja Pelayanan/ Jasa Ekosistem	Efisiensi Pemanfaatan SD Alam	Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim	Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati
1.	Program Peningkatan Kapasitas Iptek dalam Sistem Produksi Industri Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> Program ini dapat menurunkan kualitas lingkungan apabila tidak disertai dengan pengolahan limbah yang tepat 	<ul style="list-style-type: none"> dapat memberikan meningkatkan pencemaran (udara, air dan tanah) 	<ul style="list-style-type: none"> Penurunan jasa Pemurnian air Pengurangan jasa pengolahan dan pengurai limbah 	Memanfaatkan SD Alam local untuk mendukung system industry rakyat	Dapat meningkatkan emisi GRK dan akan meningkatkan kerentanan terhadap perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none"> Pencemaran yang terjadi dapat berpengaruh terhadap penurunan keanekaragaman hayati
2.	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan akses jalan bagi masyarakat Berkurang atau hilangnya tanaman turus jalan Semakin lebar jalan kemungkinan beralih fungsi lahan di sekitar area jalan 	Berpotensi mengakibatkan kebisingan, penurunan kualitas udara (pencemaran udara)	Pengurangan jasa pemeliharaan kualitas udara	Memanfaatkan SD Alam sebagai bahan baku pada tahap pembangunan	Program pembangunan jalan dan jembatan akan menebang tanaman turus jalan sehingga berkontribusi menaikkan emisi GRK	<ul style="list-style-type: none"> Penurunan jumlah dan jenis flora fauna Perubahan lingkungan ekosistem hayati

No	Nama Program	Muatan KLHS					
		Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Perkiraan Mengenai Dampak dan Resiko Lingkungan	Kinerja Pelayanan/ Jasa Ekosistem	Efisiensi Pemanfaatan SD Alam	Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim	Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati
		utamanya sawah ke permukiman					
3.	Program Penguatan Kelembagaan Pangan Pemerintah dan Masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> berpotensi memicu konversi lahan untuk gudang dan lantai jamur mengurangi produksi pangan 	Berpotensi menimbulkan pencemaran udara	<ul style="list-style-type: none"> Pengurangan jasa kualitas pemeliharaan udara Penurunan jasa ekosistem penyedia pangan 	Memanfaatkan SD Alam sebagai bahan baku pada tahap pembangunan	berpengaruh terhadap produksi emisi GRK	berpengaruh pada penurunan keanekaragaman hayati
4.	Program peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana pelayanan kesehatan	Berpotensi terjadinya konversi lahan karena adanya pembangunan puskesmas dan rumah sakit baru. Berpotensi mengurangi produksi pertanian	peningkatan limbah medis, B3 dan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Penurunan jasa ekosistem penyedia pangan pengurangan jasa pengurai limbah 	Efisiensi pemanfaatan sumberdaya local dalam pembangunannya	berpengaruh terhadap produksi emisi GRK	berpengaruh pada penurunan keanekaragaman hayati
5.	Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sarana dan	meningkatnya timbulan sampah dan limbah	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya timbulan sampah dan 	<ul style="list-style-type: none"> Pengurangan jasa kualitas udara 	Efisiensi pemanfaatan sumberdaya local	Kenaikan timbulan sampah akan cenderung	berpengaruh terhadap penurunan keanekaragaman

No	Nama Program	Muatan KLHS					
		Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Perkiraan Mengenai Dampak dan Resiko Lingkungan	Kinerja Pelayanan/ Jasa Ekosistem	Efisiensi Pemanfaatan SD Alam	Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim	Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati
	Prasarana Perdagangan.		limbah cair • Meningkatkan pencemaran udara (bau)			meningkatkan emisi Gas CO2 dari sampah dan dapat berpengaruh terhadap pemanasan global	hayati

Berdasarkan Deskripsi Indikasi Program RPJMD Kabupaten Purbalingga 2016-2021 terhadap Muatan KLHS maka dari kelima program KLHS tidak ada yang berkaitan dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis dan permasalahan Koperasi dan UMKM yang merupakan rekomendasi hasil rapat koordinasi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

a. Rekomendasi kepada Kementerian Koperasi dan UKM :

1. Menerbitkan regulasi tentang tata hubungan kerja antara Pusat dan Daerah terkait sector KUMKM.
2. Mengembangkan Sistem informasi KUMKM secara Nasional, untuk penyediaan data manajemen, e-commerce, pemberdayaan UMKM berbasis IT, layanan on-line bagi Koperasi dan UMK.
3. Membangun mekanisme bersama dengan per-Bank-an untuk monitoring dan evaluasi KUR.
4. Mengevaluasi dan mereview kebijakan perkoperasian serta menerbitkan kebijakan yang berkaitan dengan :
 - a) Pembatasan Ijin Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan mengevaluasi Praktek Simpan Pinjam;
 - b) Kewenangan Penerbitan Badan Hukum Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar agar diserahkan kepada Daerah;
 - c) Penyediaan Tenaga Fungsional Pengawas dan Penyidik Koperasi yang seimbang dengan jumlah Koperasi, dan mengusulkan kepada Menteri PAN dan RB;
 - d) Penambahan Tenaga Penyuluh KUMKM melalui Sistem Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan peningkatan kapasitas tenaga pendamping/ penyuluh KUMKM melalui pelatihan berkelanjutan;
 - e) Revitalisasi dan prioritas penanganan pada Koperasi Sektor Riil (termasuk KUD);
 - f) Pengaturan tata cara pendirian Kantor Cabang bagi koperasi Sektor Riil.

g) Pengaturan tata kelola Koperasi sebagai distributor pupuk.

b. Rekomendasi hasil rakor Kepada Pemerintah Provinsi:

1. Mendorong Kabupaten/Kota :
 - a) Melakukan penguatan peran KUMK sebagai *Soko Guru Perekonomian Daerah*.
 - b) Melakukan percepatan penerbitan Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan memberikan kemudahan dan fasilitas ijin usaha lainnya bagi UMKM.
2. Mengevaluasi keberadaan lembaga pemeringkatan Koperasi sebagai dasar pembinaan dan optimalisasi peran mereka dalam meningkatkan kualitas Koperasi;
3. Mendorong pengembangan OVOP terintegrasi dengan berbagai program Pemerintah Provinsi (Pengembangan Kawasan Wisata, Penyediaan Akses Infrastruktur, Desa Vokasi, Atau pun Desa Mandiri Pangan).
4. Mengembangkan dan memfasilitasi kerjasama antara UKM dan Koperasi dengan pihak ketiga, antara Kabupaten/Kota dengan pihak ketiga dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM.
5. Memprioritaskan peningkatan kualitas dan tata laksana Koperasi, pengembangan kapasitas dan kompetensi pengurus/pengelola Koperasi maupun Aparatur Pembina Koperasi, serta penerapan standarisasi produk dan pengkoordinasian pelaksanaan KITE IKM pada Kabupaten/Kota.

c. Rekomendasi hasil rakor kepada Pemerintah Kabupaten/Kota :

1. Meningkatkan komitmen Daerah dalam pembinaan Koperasi dan UMKM melalui dukungan penyediaan anggaran, sarana prasarana, serta Sumber Daya Manusia yang memadai.
2. Peningkatan kapasitas dan kualitas Aparatur Pembina Koperasi dan UMKM melalui berbagai diklat maupun workshop.

3. Memprioritaskan program/ kegiatan penyediaan dukungan operasional tenaga pengawas fungsional, percepatan reorganisasi dan revitalisasi Koperasi, optimalisasi peran dan fungsi Koperasi pendukung OVOP serta perluasan akses permodalan bagi usaha Mikro.